SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Untuk Memenuhi Peryaratan

Memperoleh Gelar Serjana Akuntansi

Oleh:

WINDI ARDINDA PUTRI

220412038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

WINDI ARDINDA PUTRI

220412038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

LEMBERAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

WINDI ARDINDA PUTRI

220412038

Telah dipriksa dan disetujui untuk diseminarkan

Dihadapan Dewan Skripsi

Taluk Kuantan, 08 September 2026

Pebimbing I	Pebimbing II
M. Irwan, SE., MM	Diskhamarzaweny, SE., MM
NIDN. 1012058301	NIDN. 1012038701

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Yeni Sapridawati, SE.,M.AK

NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: WINDI ARDINDA PUTRI
NPM	: 220412038
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 24 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



WINDI ARDINDA PUTRI
NPM. 220412038

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

WINDI ARDINDA PUTRI

220412038

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi

Pada tanggal 08 September 2026

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO	NAMA DOSEN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Ketua	1.
2	M. Irwan, SE.,MM	Sekretaris	2.
3	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota	3.
4	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota	4.
5	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Anggota	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Sarjan, M, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

Ketua
Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak
NIDN. 1011019002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"*Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.*"

(B.J. Habibie)

"Mentalitas kita seperti naik sepeda, jika berhenti bergerak kita akan jatuh"

(B.J. Habibie)

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit dan rendahkan hatimu ke bumi"

(Bung Karno)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadapan Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahannya. skripsi ini kupersembahkan untuk Orang Tua dan Keluarga tercinta, terimakasih untuk doa, sabra, dan support yang tidak pernah habis ini baru langkah kecil untuk membahagiakan kalian. untuk bapak/ibuk dosen pembimbing terimakasih sudah sabra membimbing dang nyaranin sampai selesai. Untuk aku yang dulu sering begadang dan hamper nyerah, terimakasih sudah bertahan sampai titik ini dan untuk teman-teman seperjuangan yang terimakasih sudah jadi tempat ngeluh dan semangat bareng

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehinga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi“.

Penulis menyadarai bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan, M, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M.Ak** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **M. Irwan, SE., MM** selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.

5. Ibu **Diskhamarzaweny, SE., MM** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran yang berguna selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak **Junaidi, S.Pd.SD** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 003 Benai Kecil yang telah membantu dalam pengumpulan data.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda penulis **Darpis** dan Ibunda penulis **Hera Putri** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih saying, penuh cinta, serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada saudara/i penulis **Putri Handayani** dan **Aldan Irfanzyah** terimah kasih banyak telah mendo'akan dan mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. terimakasih untuk kucing kesayangan yang selalu membawa kebahagiaan disetiap harinya; Taiger, Taiga, Oyen, Oren, Bolang, Sincan, Cimol, Momo, Keken, dan Tayo
11. terimahkasi untuk kucing ku yang tersayang yang telah menemani dalam duka dan suka dalam pembuata skripsi ini yaitu Moci dan Dodo terimakasih atas segala tingkah dan kehebohan serta dengkuran yang hangat kalian yang selalu menjadi hiburan paling ampuh di kala lelah. tanpa kehadiran kalian, hari-hari tentu terasa jauh lebih sepi dan membosankan.
12. Seluruh teman-teman kampusku dan yang lainnya semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia dan akan kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Semoga

kita menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada Negara Bangsa Agama Kususnya Akuntansi angkatan 2022.

13. Dan seluruh yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan yang berarti. Penulis ucapkan begitu banyak terimakasih.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Benai, 28 Agustus 2026
Penulis

WINDI ARDINDA PUTRI
NPM. 220412038

ABSTRAK

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Windi Ardinda Putri
M. Irwan
Diskhamarzaweny

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS Reguler di SD Negeri 003 Benai Kecil berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 (Juknis BOSP). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil belum sepenuhnya sesuai dengan Juknis tahun 2025. Pada aspek transparansi, sekolah dinilai kurang terbuka karena tidak memublikasikan dokumen RKAS dan laporan realisasi anggaran pada papan pengumuman atau website sekolah. Pada aspek akuntabilitas, meskipun pelaporan online melalui aplikasi ARKAS sudah berjalan baik, ditemukan pelanggaran berat pada komponen penggunaan dana. Sekolah mengalokasikan anggaran pembayaran honor guru sebesar 50,70% (Rp57.045.700) dari total dana. Angka ini melanggar batas maksimal yang ditetapkan Juknis 2025 untuk sekolah negeri, yaitu sebesar 20%, sehingga terjadi kelebihan alokasi sebesar 30,70%. Pihak sekolah disarankan untuk lebih disiplin mematuhi batas anggaran honorer dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana BOS

ABSTRACT

ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) FUNDS AT STATE ELEMENTARY SCHOOL 003 BENAI KECIL, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

Windi Ardinda Putri
M. Irwan
Diskhamarzaweny

This study aims to analyze the compliance of transparency and accountability in managing Regular BOS Funds at SD Negeri 003 Benai Kecil based on Permendikdasmen Number 8 Year 2025 (BOSP Technical Guidelines). The research method applied is descriptive qualitative, utilizing observation, interviews, and documentation for data collection. The results show that in general, the management of BOS Funds at SD Negeri 003 Benai Kecil does not fully comply with the 2025 Technical Guidelines. Regarding transparency, the school is non-disclosing as it fails to publish RKAS documents and budget realization reports on the school's information board or website. In terms of accountability, although online reporting via the ARKAS application runs smoothly, a severe violation was found in the fund utilization component. The school allocated 50.70% (Rp57,045,700) of the total budget for teacher honoraria payments. This exceeds the 20% maximum limit established by the 2025 Guidelines for public schools, resulting in an overallocation of 30.70%. The school is advised to strictly enforce the honoraria budget limits and enhance financial transparency for the public.

Keywords : Transparancey, Accountability, BOS Fund Management

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MOTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Landasan Teori 8
2.1.1 Transparansi 8
2.1.1.1 Definisi Transparansi 8
2.1.2 Akuntabilitas 10
2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas 10
2.1.2.2 Akuntabilitas Publik 12
2.1.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15
2.1.3.1 Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15
2.1.3.2 Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 16
2.1.3.3 Peraturan Mentri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ... 16
2.1.3.4 Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 20
2.1.3.5 Ketentuan Larangan Pembiayaan dalam Juknis BOSP 22
2.1.3.6 Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS 23
2.2 Tujuan Empirik 24
2.3 Penelitian Terdahulu 28
2.4 Kerangka Pemikiran 32

BAB III METODE PENELITIAN 33

3.1 Rencana Penelitian 33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 33
3.3 Populasi dan Sampel 34
3.3.1 Populasai 34
3.3.2 Sampel 35
3.4 Jenis dan Sumber Data 35
3.4.1 Jenis Data 35
3.4.2 Sumber Data 35
3.5 Teknik Mengumpulan Data 37
3.6 Teknik Analisis Data 38

BAB V PENUTUP 39
5.1 Kesimpulan 39
5.2 Saran 39
DAFTAR PUSTAKA..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana BOS 2025 4

2.1 Penelitian terdahulu 28

3.1 Jadwal Penelitian 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.2 Kerangka Pemikiran..... 32

3.1 Jadwal Penelitian 34

Daftra Lampiran

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Wawancara

Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 4. Balasan Pra Riset

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Proposal dan Skripsi

Lampiran 7. Lembaran Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal

Lembaran 8. Lembaran Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi

Lampiran 8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sebagai hak warga Negara diatur pada Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, serta Negara memprioritaskan anggaran Negara untuk pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN dan APBD untuk pemenuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Masalah pendidikan yang saring ditemui pada dunia pendidikan ialah tingginya angka putus sekolah, diakibatkan oleh angka kemiskinan di Indonesia (Widodo, 2021).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan bukan sekadar belajar di kelas, tapi langkah nyata yang kita susun agar tiap siswa bisa aktif mengali potensi terbaiknya. Tujuannya yaitu membentuk karakter yang religious, cerdas, punya kendali diri, dan berakhlak mulia. Intinya pendidikan kita berakar pada nilai agama dan budaya Indonesia agar kita siap menghadapi perubahan zaman. (UU No. 20 Tahun 2003).

Dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam Pasal 1 yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) merupakan dana yang diprioritaskan

untuk membiayai belanja nonpersonalia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dana ini bertujuan bagi menyelenggarakan program wajib belajar, namun juga dapat dialokasikan untuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Dana Bantuan Operasional Penyelenggataan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD) merupakan alokasi dana yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia dalam rangka mendukung seluruh proses pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini.

Standar Pendidikan Nasional adalah kerangka acuan yang digunakan dalam dunia pendidikan di indonesia untuk memastikan kualitas kesetaraan pendidikan di seluruh Negara. Standar ini memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah dan tenaga pengajar menyelenggaraan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program bantuan pemerintah untuk membantu pendanaan biaya administransi kegiatan yang ada disekolah seperti penyediaan alat-alat pembelajaran, pembiayaan honor, pemelihara sarana dan prasarana sekolah.

Hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana BOS yaitu pengelolaan Dana BOS penggunaan dana harus dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana BOS. (Surharti, Sekjen Kesmendikdasmen : 2025)

1. Jumlah siswa yang tercatat disekolah adalah poin penting sebagai awal dari akuntabilitas dana BOS.

2. Siswa aktif belajar disekolah.
3. Dana BOS harus digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
4. Penggunaan dana BOS harus mengutamakan hal-hal yang langsung yang berhubungan dengan kualitas pendidikan, seperti pembelian buku, alat peraga, biaya kegiatan pembelajaran, dan pengembangan fasilitas sekolah
5. Dana BOS bias digunakan untuk kerusakan-kerusakan ringan

Rencana penggunaanya harus melalui diskusi yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Bagaimana dana tersebut digunakan dan kemudian dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, (RAPBS). Setelah masuk RAPBS transparansi harus dijaga dengan mengumumkan rencana penggunaan Dana BOS di media pengumuman sekolah seperti papan pengumuman, atau sekolah-sekolah juga bias menggunakan *website* sekolah.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 003 Benai Kecil perlu diteliti karena adanya kekhawatiran mengenai efektifitas tata kelola keuangannya.

Kondisi ini berisiko menciptakan celah penyimpangan dan ketidak jelasan dalam alokasi dana pendidikan. Oleh karena itu penting dilakukan untuk memotret secara nyata apakah pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut sudah dijalankan secara terbuka dan akuntabel sesuai dengan regulasi terbaru, atau justru masih menghadapi hambatan dalam keterbukaan akses informasi dan pengawasan.

Permasalahannya yaitu apakah pihak sekolah sudah menjalankan prinsip transparansi dengan nyata. Misalkan, apakah rencana penggunaan Dana BOS sudah diumumkan dipapan pengumuman atau webset sekolah sepaya masyarakat tahu atau justru informasi masih tertutup.

SD Negeri 003 Benai Kecil merupakan salah satu satuan pendidikan dasar negeri yang terletak di Kecematan Benai, Sekolah ini memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan wajib bagi belajar bagi sekitar 125 siswa (data tahun 2025) dengan dukungan pendanaan utama dari Dana BOS Reguler. Dengan fliktuasi jumlah peserta didik setiap tahunnya, efektivitas dan akuntabilitas tata kelola keuangan di sekolah ini menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti guna memastikan anggaran yang tepat sasaran.

Table 1.1
Besar Bantuan Dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Siswa laki-laki	Jumlah Siswa Perempuan	Jumlah Siswa	Satuan Biaya
1.	2022	83	65	148 siswa	133.200.000
2.	2023	77	57	134 siswa	120.600.000
3.	2024	77	51	128 siswa	115.200.000
4.	2025	68	57	125 siswa	112.500.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BOS, 2025

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jimlah bantuan tersebut tergantung jumlah siswa dan setiap anak mendapatkan sejumlah Rp 900.000, dan setiap Setiap Sekolah Dasar pembagiannya sama.

Berdasarkan Juknis BOS yang berlaku dari table tahun 2022 hingga 2025, alokasi dana ditentukan secara *unit cost* per siswa. Data di table 1.1 menunjukkan:

Adanya tren perubahan jumlah siswa (dari 134 siswa di 2023 menjadi 128 di 2024, lalu turun menjadi 125 di 2025) menuntut keakuratan pelaporan Dapodik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis termotivasi untuk mengangat judul mengenai **"ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".** Judul penelitian ini merupakan replikasi penelitian Jumiati (2018).

Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitiannya, Jumiati berlokasi di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan penelitian ini berlokasi di SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalahnya yaitu tentang:

1. Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025?
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025
2. Untuk mengetahu kesesuaian akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan sekaligus referansi tambahan dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

   Sebagai sarana untuk mengasah kemampuan riset sekaligus bentuk kontribusi nyata penulis bagi dunia pendidikan, dengan menerapkan teori dan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Bagi Instansi

   Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam menjalankan proses pengelolaan Dana BOS, sehingga prinsip keterbukaan dan tanggung jawab publik dapat terlaksanakan dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian serupa yang lebih mendalam, dengan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda guna memperkuat hasil dan kesimpulan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi

2.1.1.1 Definisi Transparansi

Prinsip transparansi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan, misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi orang tua, masyarakat dan pemeruntah dalam penyelenggaraan seluruh program di lembaga pendidikan. Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan (*trust*) timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai (Siswanto, E. 2013). Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua *stakehoders* pendidikan dan orang tua peserta didik misalnya rencana anggaran pendapatan dan belajar sekolah (RAPBS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Dokumen-dokumen ini, dipajang pada papan pengumuman sekolah, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di perguruan tinggi bisa di akses secara *online* (Ratnaningtyas, K. & Setiyani, R., 2017)

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KKG 2010). (Patrick, 2007; Deakins et al., 2010).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) mengartikan transparansi sebagai pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan muda diakses oleh semua pihak yang berkepentingan ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya harus memenuhi persyaratan hakim, tetapi juga harus mengungkapkan informasi penting untuk keputusan oleh semua pemangku kepentingan.

Menurut Badudu dan Zain (1996), transparansi berarti kejernihan, kejelasan, dan keterbukaan yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dalam konteks keuangan, transparansi mencakup penyampaian informasi tentang kinerja keuangan dan tindakan organisasi dengan jelas dan terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meijer (2013) menjelaskan transparansi sebagai ketersediaan informasi dan aksesnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini berhubungan dengan ketersediaan informasi mengenai organisasi pemerintahan yang memungkinkan pemantauan dan akses oleh publik dan pelaku eksternal terhadap kinerja organisasi.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas

Secara harfiah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability.* Suwardjono (2014) memperkenalkan terjemahan untuk *accountability* dengan istilah pertanggungjelasan. Verba bertanggung jelas sengaja diciptakan sebagai padan kata *to be accountability for* untuk membedakannya dengan verba bertanggung jawab sebagai padan kata *to be responsible for*. Oleh karena itu, istilah *accountability* dan *responsibility* dapat diterjemahkan menjadi "pertanggungjelasan" dan "pertanggungjawaban", sementara bentuk verba lainnya adalah "mempertanggungjelaskan" dan "mempertanggungjawabkan".

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KKG 2010). (Forbes et al., 2006).

Mahmudi (2014) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai tanggung jawab agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas terkait dengan penggunaan sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandate (principal). Berbeda dengan pandangan Suwardjono yang memisahkan konsep akuntabilitas dan responsibilitas, Mahmudi (2014) mengintegrasikan konsep akuntabilitas ke dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas dijelaskan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Friedman (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antaraindifidu atau kelompok individu yang satu bertanggung jawab kepada yang lain untuk kepentingan tertentu. Biasanya, akuntabilitas dikaitkan dengan kinerja, di mana akuntabilitas kinerja berkaitan dengan peran pemimpin dalam menjalankan program yang menjada tanggung jawabnya, memungkinkannya untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan.

Akuntabilitas adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan berarti penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggung-jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku (Puarada, N. A. 2016). Tujuan akuntabilitas pembiayaan lembaga pendidikan adalah menilai kinerja lembaga pendidikan dan keputusan *stakeholder*-nya terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawaban komitmen penyelenggaraan pendidikan kepada *stakeholder*-nya atas dana yang dihimpun dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Sutedjo, S.2009).

Menurut Mardiasmo (2013) akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan menyajikan, pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan akuntabilitas ini, pengelolaan lembaga pendidikan bisa membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Adapun pihak-pihak yang

menuntut terbangunnya akuntabilitas, antara lain orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah. Kepada *stakeholders* pendidikan itulah pengelolaan pendidikan.

Ada empat pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, manajemen keuangan lembaga pendidikan; (Shafratunnisa, F.;2016).

1) Adanya transparasi penyelenggara manajemen keuangan lembaga pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola dana lembaga pendidikan tersebut,
2) Adanya standar kinerja pengelolaan keuangan di setiap lembaga pendidikan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, antara lain sebagai otorisator, ordonator dan bendaharawan,
3) Adanya partisipasi untuk salang menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah dan pelayanan yang cepat,
4) Regulasi pengelolaan keuangan yang memberikan kepastian hukum, maupun tata kelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan berbagai kebijakan public memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal

2.1.2.2 Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2018) Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, kementrian dan lembaga-lembaga negara).

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemenang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik

untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan laun dinyatakan dalam penggunaan sember dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *make up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati

dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara *fair* melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat.

2.1.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.3.1 Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan operasional sekolah merupakan kegiatan yang penunjang pelaksanaan wajib belajar yang disalurkan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan yang berguna membantu kelancaran pelaksanaan aktivitas belajar mengajar yang telah disusun dalam rencana kerja beserta aturan kegiatannya (Ali & Aprina, 2019).

Program BOS ialah program nasional pendidikan yang menggunakan anggaran besar dan berhubungan langsung pada kehidupan masyarakat (Haqiqi & Nugraha, 2019).

2.1.3.2 Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan satuan Program Pemerintah Indonesia, yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2005. Secara umum, program dana BOS ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun bermutu. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

a) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
b) Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
c) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta (Dit. PSD, 2010).

2.1.3.3 Peraturan Mentri Pendidikan Dasar dan Mengengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

1. Definisi Dana BOSP dan Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonoperasonalia bagi Satuan Pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Dekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dana BOS terbagi menjadi dua jenis:

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai bekinerja baik.

2. Variabel Pengelolaan (Prinsip Pengelolaan Dana BOSP)

Berdasarkan pasal 2 Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, pengelolaan Dana BOSP harus Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana
b. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan
c. Efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
d. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Transparansi yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan

Pada pasal 7 Satuan Pendidikan Penerima Dana BOS meliputu:

b. SD
c. SMP
d. SMA
e. SLB dan
f. SMK

Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Dana BOS Reguler; dan
b. Dana BOS Kinerja.

3. Variabel Penggunaan Dana (Komponen penggunaan Dana BOS Reguler)

Beberapa komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
b. Pengembangan perpustakaan (paling sedikit 10% untuk penyediaan buku).
c. Pelaksanaan kegiatan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
d. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (maksimal 20% dari total alokasi)
e. Pembayaran honor (maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta).

4. Variabel Kinerja (Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja)

Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik.

Dengan komponen penggunaan Dana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi:

a. Sekolah yang memiliki prestasi; dan
b. Sekolah yang memiliki kinerja terbaik.

Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Asesmen dan pemerataan telenta
b. Pengembangan talenta dan akuntabilitas prestasi
c. Pengelolaan manajemen dan ekosistem
d. Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan bagi sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi.
e. Sekolah pengimbas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sekolah yang memiliki Prestasi penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi kriteria (memiliki prestasi tingkat nasional dan masuk dalam 5 terbaik sekolah yang memiliki prestasi terbaik diwilayah provinsi)

Bagi Sekolah yang memiliki Kinerja Terbaik

a. Kegiatan pembelajaran mendalam; dan

b. Kegiatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisal.

5. Variabel Akuntabilitas dan Pelaporan

Rencana kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

Penyaluran Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

2.1.3.4 Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

A. Tahapan Perencanaan dan Penggunaan Dana BOSP

1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP dilakukan sebelum Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP.
2. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP disusun untuk 1 (saru) tahun anggaran dalam dalam bentuk dokumen RKAS
3. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan:
    a. Kebutuhan Satuan Pendidikan; dan

b. Hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan

4. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan:
    a. Komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakan;
    b. Rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan
    c. Rincian barang/jasa kebutuhan; dan
    d. Satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.
5. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah
6. Hasil penyusunan dokumen RKAS diinput/dituangkan kedalam aplikasi kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh kementrian.

B. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP

1. Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOSP yang telah diimput pada sistem aplikasi yang disediakan oleh kementrian.
2. Setuap penggunaan Dana BOSP oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendikung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

3. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diimput kedalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
4. Pengimputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan.

C. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP

1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaanbarang/jasa dan penggunaan dana tahunan berkenaan.
3. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan kementrian.

2.1.3.5 Ketentuan Larangan Pembiayaan dalam Juknis BOSP

Terdapat larangan Spesifik mengenai hal-hal yang tidak boleh dibayar atau dibiayai menggunakan Dana BOSP (termasuk Dana BOS).

a. Melakukan transfer Dana Bosp ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana.
b. Membungakan untuk kepentingan pribadi
c. Meminjamkan kepada pihak lain

d. Membeli perangkat lunak unruk pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik Baru dalam jaringan
f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan.
g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
h. Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik.
i. Membangun gedung atau ruangan baru.
j. Membeli instrument investasi

2.1.3.6 Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Efektifitas adalah ukuran sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam terlaksana semakin tinggi pencapaian dari kegiatan tersebut maka semakin naik juga tingkat efektivitasnya (Rakhmawati, 2018).

Manajemen keuangan adalah salah satu sumber daya yang meningkatkan efektivitas juga efisiensi pengelolaan pendidikan, dimana dengan manajemen keuangan sebuah lembaga dapat melakukan pengelolaan keuangan pada tahun perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian yang tepat terkait pengelolaan manajemen keuangan (Noor & Monita, 2022).

Dalam dunia pendidikan suatu lembaga memerlukan manajemen keuangan yang baik agar pengelolaan keuangan dalam lembaga tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien yang meliputi pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebuah analisis yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diharapkan, oleh karena efektivitas

pengelolaan anggaran pendidikan dianjurkan maupun diimplementasikan dalam setiap institusi pendidikan (Ismail & Sumaila, 2020).

Diketahui bahwa seluruh sekolah yang telah melakukan implementasi dana bos sesuai dengan Juknis yang sudah ada, dimana dalam penyusunan RKAS Dana Bos setiap sekolah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, di mana dalam penyusunan RKAS Dana Bos disusun berdasarkan 12 komponen pembiayaan sesuai kebutuhan sekolah, Dana Bos yang digunakan bendahara sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan.

Selanjutnya ada Akuntabilitas, setiap sekolah melakukan pengelolaan dana bos berdasarkan Juknis No.63 Tahun 2022 yang mana dalam pengelolaan dana BOSP mengacu pada Raport Mutu pendidikan dan prioritas kebutuhan sekolah dan peserta didik dan apabila terdapat penyimpangan penggunaan dana BOS maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang tertuang dalam Juknis BOS.

2.2 Tujuan Empirik

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana BOS adalah sebagai berikut:

Jumiati (2018) melakukan penelitian dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammasiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini meripakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utamanya adalah buruknya transapransi informasi oleh pihak sekolah dan rendahnya kepedulian para kepentingan, yang menyebabkan pengelolaan dana BOS menjadi tidak akuntabel.

Putri Wajo (2018) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) Sebagai Penyedia Informasi Pengendalian Internal pada MTs Babussalam Tebing tinggi Simandolak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Evaluasi Sistem Informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Dana BOS sebagai penyediaan informasi pengendalian internal pada MTs sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2018, tetapi masih ada yang belim sesuai pada tahun 2017 ada penurunan disebabkan penurunan siswa baru.

Nur Aiza (2019) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 010 Bukit Kauman Kecematan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif komperatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu masalah utamanya yaitu dalam pengelolaan dana BOS masih belum sesuai dengan petunjuk teknis juknes 2017.

Mainoni Dwi Rahayu (2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 013 Satu Atap Bukit Pedusunan Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singing. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu masalah utamanya yaitu untuk tahun 2015 sampai dengan 2018 masih belum terlalu baik, banyak transaksi yang tidak disertai bukti pendukung dan kelengkapan administrasinya masih kurang. Seperti kwitansi kosong yang dimiliki oleh sekolah, ketiadaan tanda tangan, ketiadaan cap dan ketiadaan materai.

Tanto Hidayat (2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana BOS (Sekolah Dasar Negeri 009 Logas Kecematan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian yaitu masalah utamanya adalah jumlah Dana BOS yang diterima masih minim dan pencairan Dana BOS dari pemerintah ke Sekolah tidak tepat waktu sehingga program pendidikan cukup terganggu, kualitas pembelajaran menurun, administrasi menjadi sulit dan kepercayaan wali murid menurun.

Wulan Asih Munazriyanti Dalimunte, (2022) melakukan penelitian dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengelolaan Dana BOS di SDN 014746 Kwala Sikasim, ada satu permasalahan yang menjadi hambatan dalam aspek transparansi yaitu sekolah belum menjalankan prinsip transparansi dengan baik dalam hal publikasi realisasi anggaran, hal ini dibutuhkan dengan tidak adanya pemasangan papan informasi mengenai realisasi penggunaan Dana BOS di lingkungan sekolah.

Laila Qoni'izzah (2023) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPTD SDN 01 Sidomukti Kecematan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Penelitian ini merepakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utamanya adalah UPTD SDN 01 Sidomukti menyalahgunaan laporan pertanggungjawaban BKU yang masih menggunakan perhitungan manual tanpa adanta rumus di dalam Microsoft Excel, sehingga total harga jumlah pengeluaran tidak sesuai dengan jumlah barang yang dibeli, perencanaan

pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kondisi rill kebutuhan sekolah. Masalah yang lainnya adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS yang berakibat pada tidak terpenuhnya anggaran dalam kegiatan belajar mengajar, keterlambatan pencairan dana BOS disebabkan disebabkan oleh SPJ yang harus dilaporkan sekolah terlebih dahulu.

Sakinatul Hakiki, (2023) melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada SMK Nurul Hasan Kecematan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utamanya adalah SMK Nurul Hasan masalah keterlambatan pencairan dana BOS yang harusnya cair diawal Januari untuk periode Januari-Maret, seringkali terlambat cair sehingga Februari atau Maret. Keterlambatan ini memgganggu kegiatan sekolah karena laporan penggunaan dana juga terlambat dilaporkan.

Sartika Eri Damayanti, (2023) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Palebon 03 Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatf. Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Palebon 03 Semarang, sudah cukup baik dari segi akuntabilitas dan transparansi tetapi ada permasalahnya yaitu orang tua atau wali murid belum mengetahui tentang informasi pengelolaan dana BOS tersebut.

M. Jumaidil Sapri (2023) melakukan penelitian tentang Analisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Muhamadiya Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yaitu masalah utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas dana belum sepenuhnya terbuka sesuai dengan Juknis 2022 dan masih banyak laporan pertanggungjawaban yang tidak valid atau cacat hukam karena menggunakan kwitansi kosong, dan dokumen yang tidak distempel, materai, maupun tandatangan yang sah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan agar penulis memiliki landasan teori yang lebih kuat dan komprehensif dalam mengkaji permasalahan. Dalam hal ini, penulis menyertakan beberapa jurnal skripsi penelitian yang relevan sebagai referensi untuk memperkarya perspektif dan materi pembahasan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Jumiati (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, masalah utamanya adalah buruknya transapransi informasi oleh pihak sekolah dan rendahnya kepedulian para kepentingan, yang menyebabkan pengelolaan dana BOS menjadi tidak akuntabel.
2.	Putri Wajo (2018)	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bantuan Operasinal	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Evaluasi Sistem Informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Dana BOS sebagai penyediaan informasi pengendalian internal pada

		Sekolah (BOS) Sebagai Penyedia Informasi Pengendalian Internal pada MTs Babussalam Tebing tinggi Simandolak		MTs sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2018.
3.	Nur Aiza (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 010 Bukit Kauman Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif Komparatif	Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Pengelolaan dana BOS dalam hal perencanaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017 2. Pengelolaan dana BOS pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017 3. Pengelolaan dana BOS dalam hal pengawasannya sudah sesuia dengan petunjuk teknis tahun 2017 4. Pengelolaan dana BOS dalam hal pertanggungjawaban sudah sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017
4.	Mainoni Dwi Rahayu (2020)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 013 Satu Atap Bukit Pedusunan Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Analisi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Satu Atap tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) 2018
5.	Tanto	Analisis	Deskriptif	Hasil penelitian

	Hidayat (2021)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Bos (Sekolah Dasar Negeri 009 Logas Kecematan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)	Kualitatif	menunjukan bahwa pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar berjalan cukup baik. Dengan perencanaan penyusunan RKAS yang disusun tim, disahkan kepala sekolah & komite, disosialisasikan ke wali murid. Tetapi masih ada faktor hambatan seperti dana yang minim, pencairan tidak tepat waktu)
6.	Wulan Asih Munazriyanti Dalimunte (2022)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecematan Sei Balai Kabupaten Batu Bara	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan SDN 014746 Kwala Sikasim sudah berjalan dengan cukup baik, penerapan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik, tetaoi transparansinya belum berjalan dengan baik ditunjukan dengan tidak adanya pemasangan dipapan informasi mengenai realisasi penggunaan dana BOS.
7.	Laila Qoni'izzah (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPTD SDN 01 Sidomukti Kecematan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	Penelitian Kualitatif	UPTD SDN 01 Sidomukti menyalahgunaan laporan pertanggungjawaban BKU yang masih menggunakan perhitungan manual tanpa adanta rumus di dalam Microsoft Excel, sehingga total harga jumlah pengeluaran tidak sesuai dengan jumlah barang yang dibeli, perencanaan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kondisi rill kebutuhan sekolah.
8.	Sakinatul Hakiki (2023)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan	Penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif	Penelitian ini membahas tentang ketidakpastian pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMK Nurul Hasan. Dana BOS triwulan

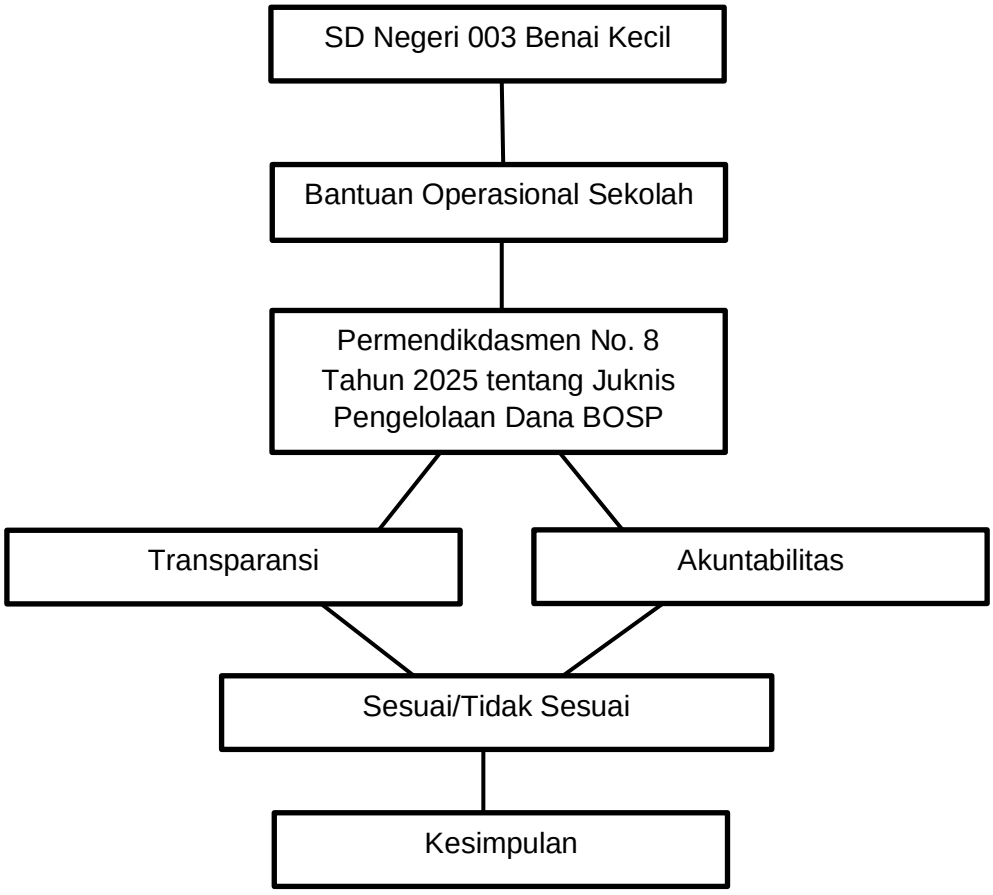
		Operasional (BOS) pada SMK Nurul Hasan Kecematan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022		1(Januari-Maret) seharusnya cair di awal Januari, namun kenyataannya sering terlambat, bahkan cair dipertengahan Februari atau awal Maret. Hal ini menyebabkan terhambatnyakegiatan sekolah karena laporan penggunaan dana BOS terlambat dilaporkan.
9.	Saktika Eri Damayanti (2023)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Palebon 03 Semarang	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini sudah cukup baik, baik dari segi akuntabilitas maupun transparansi. Permasalahan yang dihadapi oleh SDN Palebon 03 Semarang yaitu para orang tua atau wali murit belum mengetahui informasi tentang dana BOS.
10.	M. Jumadil Sapri (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Muhammadiyah Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari lima komponen pengelolaan Dana Bantuan Operasinal Sekolah (SOB) menurut petunjuk teknis (Juknis) 2022. Terdapat satu komponen yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) 2022. Untuk empat komponen pengelolaan Dana BOS telah sesuai dengan petunjuk teknis(Juknis) 2022. Dengan kata lain sebagian besar pengelolaan Dana BOS di SMK Cerenti sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) 2022.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2025

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori bab penelitian terdahulu berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai gambaran umum sebagai berikut.

2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Jumiati, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian komparatif, jenis penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih variable, kelompok sampel, atau waktu yang berbeda. Metode ini bersifat *ex post fasto*, artinya peneliti mengamati fenomena yang sudah terjadi tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi pada variable.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berfokuskan pada upaya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2018:25) penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

Jenis penlitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS). Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengelolaan Dana BOS yang diterapkan pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 003 Benai Kecil Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2025 sampai Agustus 2026

Tabel 3.1

JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	2025	2026							
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags
Penyusunan Proposal									
Pengajuan Proposal									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Revisi Proposal									
Pengumpulan Data									
Bimbingan Skripsi									
Ujian Skripsi									

Sumber : Rincian Waktu dan Tahapan Penelitian, 2025

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasai

Indrawantoro (2018;249) Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuati yang mempunyai karakteristik tertentu.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjekyang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022:130)

Populasi penelitian ini meliputi pihak pengelola Dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total 3 (tiga) orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite.

3.3.2 Sampel

Indrawantoro (2018;250) Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi.

Sugiyono (2022:131) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Metode pengambilan sampel ini adalah sensus, menurut Sugiyono (2018) metode sensus atau sampling total adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berifat deskriptif, data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data kualitatif dapat diperoleh melalui bergabagi macam teknik mengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Data bentuk lain dapat diperoleh melalui gambar, rekaman suara, dan vidio.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer menurut indriantoro (2018:142) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terdapat suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepalah sekolah, Bendahara dan Komite SD Negeri 003 Benai Kecil mengenai penggunaan Dana BOS

2. Data Sekunder menurut indriantoro (2018:143) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dokumen dan laporan penggunaan Dana BOS yang bersumber dari pihak sekolah tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data yang telah ada dan bias langsung disajikan seperti profil SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi, dokumen atau catatan-catatan pengelolaan dana BOS.

3.5 Teknik Mengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan informasi yang relevan dari lokasi penelitian, peneliti menerapkan serangkaian metode pengumpulan data seperti berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pencatatan yang sistematis terhadap suatu objek (orang), atau suatu peristiwa, dan suatu pola prilaku, tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan individu yang sedang diobservasi.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum SD Negeri 003 Benai Kecil Kecematan Benai pada kususnya observasi dilakukan untuk mengamati hasil pengelolaan Dana BOS.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme pengelolaan Dana BOS di sekolah. Melalui instrumen pertanyaan yang telah disiapkan, peneliti berupaya memahami perspektif informan terkait implementasi, transparansi serta kendala yang dihadapi guna memperoleh gambaran fenomena yang sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240) dokumentasi adalah peristiwa yang sudah berlaku. Biasanya dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip dan dokumen desa, yaitu gambaran umum mempelajari laporan

keuangan terutama mengenai pengelolaan dana desa serta literature yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penulis skripsi.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif transformasi data ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasi, Proses penyusunan, mengurutkan, dan manipulasi data untuk menyajikan informasi deskriptif. Sementara kualitatif adalah tipe data penelitian yang dikategorisasi tidak berdasarkan jumlah atau banyaknya sesuatu.

Penelitian ini menggunakan Juknis, Juknis BOSP 2025 (Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025) mengatur menggunakan dana untuk operasional sekolah (PPDB, buku, honor, pemeliharaan) dengan prinsip fleksibilitas, efektifitas, dan akuntabilitas. Dana wajib digunakan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disususn melalui efaluasi sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mrngensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil yang mengacu pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum Transparansi Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil tidak sesuai dengan juknis tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan Dokumen RKAS dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tidak dipublikasikan di papan pengumuman dan *website* sekolah.
2. Secara umum Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 003 Benai Kecil tidak sudah sesuai dengan juknis tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya pelanggaran berat yaitu pembayaran gaji honorer yang melebihi batas maksimal 20%.

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti mampu memberikan saran mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 003 Benai Kecil:

1. Untuk SD Negeri 003 Benai Kecil perlu meningkatkan dan mematuhi Petunjuk Teknis 2025 yang mana gaji honorer harus maksimal 20% tidak boleh belebihi batas dan RKAS harus dipublikasikan dipapan pengumuman atau *websat* sekolah agar masyarakat tau.

2. Pihak sekolah diharapkan mempublikasikan realisasi anggaran Dana BOS secara terbuka dan dipajang dipapan pengumuman atau *website* sekolah agar dapat diakses oleh masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel agar hasil penelitian menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo. 2018*. Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Indriantoro, Nur & Supomo Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, Andi dengan BPFE

Bastian, Indra. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas),* Yogyakarta, CV Budi Utama

R. Hakim, Mahajir, (2024). *Menuju Transparasi dan Akuntabilitas: Membangun Fondasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas*, Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Mukodas, Ali, dkk. (2024). *Pengelilaan Dana BOS di Sekolah Menengah Atas*, Lowokwaru, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Suwanda, Dadang. dkk. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Skripsi

Jumiati, (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar

Laila Qoni'izzah, (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPTD SDN 01 Sidomukti Kecematan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

M Jumadil Sapri, (2023), Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Muhammadiyah Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

putri wajo, (2018). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Bantuan Operasional Sekolah Sekolah (BOS) Sebagai Penyediaan Informasi Pengendalian Internal Pada MTs Babussalam Tebing Tinggi Simandolak, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Nur Aiza, (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 010 Bukit Kauman Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mainoni Dwi Rahayu, (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 013 Satu Atap Bukit Pedusunan Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Tanto Hidayat, (2021). Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Bos (Sekolah Dasar Negeri 009 Logas Kecematan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Sakinatul Hakiki, (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada SMK Nurul Hasan Kecematan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achad Siddiq Jamber

Wulan Asih Munazriyanti Dalimunte, (2022) Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecematan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Saktika Eri Damayanti, (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Palebon 03 Semarang, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

Jurnal

Harisantoso. Erwin., basru Wawo, Andi., & Auliah Sahlan, Izah. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selama Masa Pendemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Kendari, 6 (248)

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

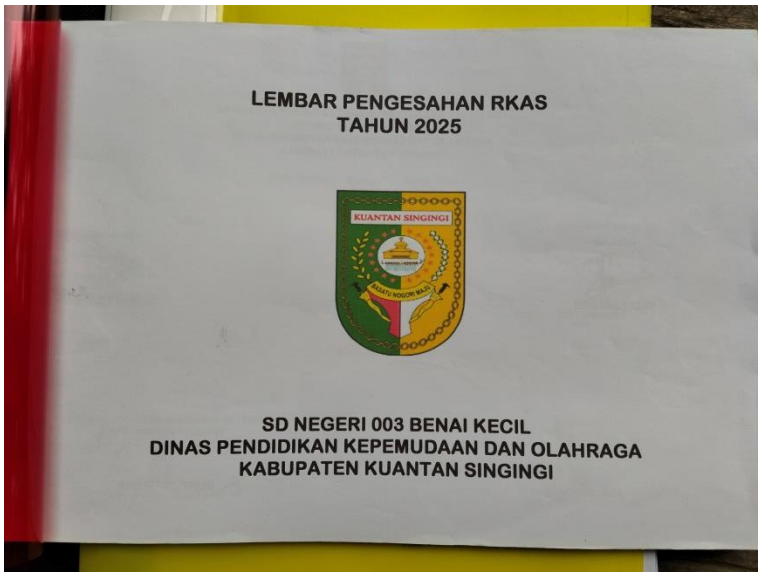
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

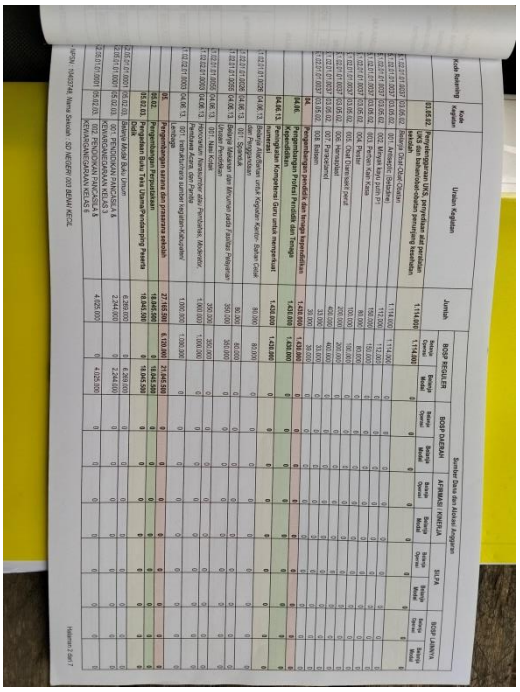
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rebublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jakarta: kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.

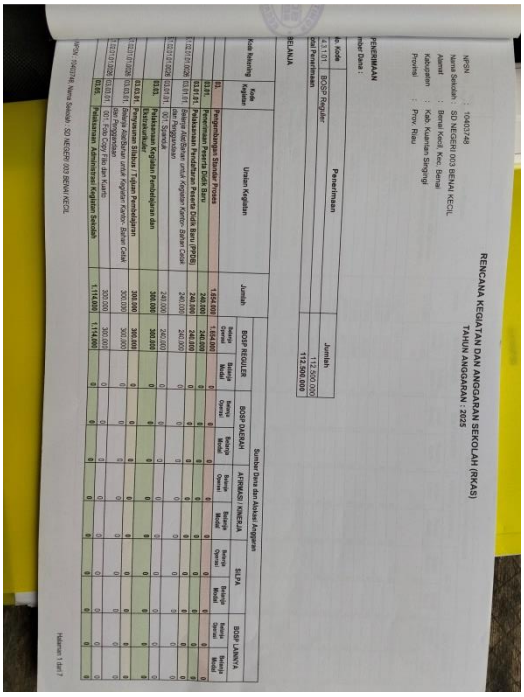
Lampiran 1. Dokumentasi











RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2025

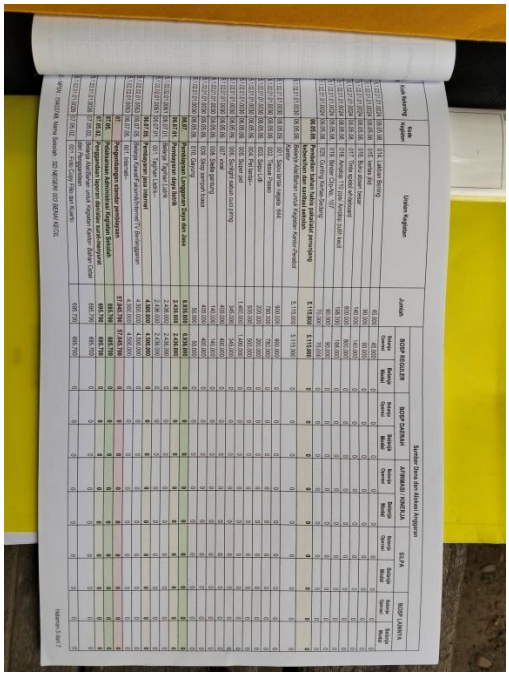
NPSN : 10403748
Nama Sekolah : SD NEGERI 003 BEHAI KECIL
Alamat : Behai Kecil, Kec. Bintan
Kabupaten : Kab. Kepulauan Riau
Provinsi : Prov. Riau

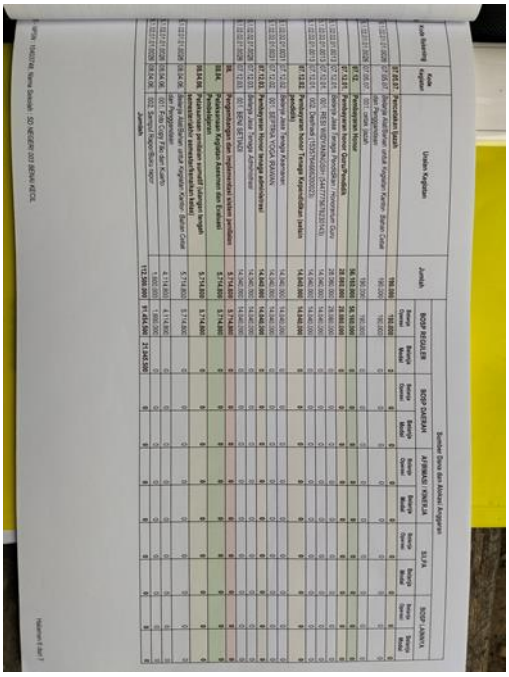
PENERIMAAN
Isikan Dana :

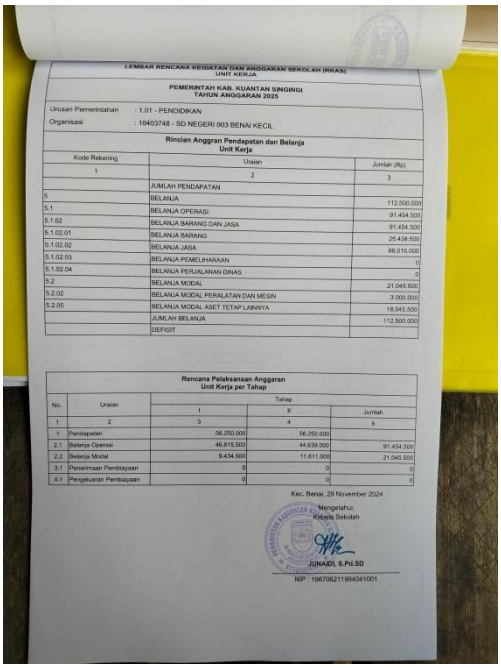
Kode	Penerimaan	Jumlah
4.1.01	BOSP Reguler	112.900.000
Jml Penerimaan		112.900.000

BELANJA

Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran											
				BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA			
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal		
5.1.02.01.0001	05.02.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Cetak	1.164.000	1.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0002	05.02.02	002. Belanja Fotokopi	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0003	05.02.02	003. Belanja Penggandaan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0004	05.02.02	004. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Cetak	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0005	05.02.02	005. Penjilidan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0006	05.02.02	006. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0007	05.02.02	007. Penyalinan/Ketik	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0008	05.02.02	008. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Cetak	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0009	05.02.02	009. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0010	05.02.02	010. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0011	05.02.02	011. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0012	05.02.02	012. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0013	05.02.02	013. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0014	05.02.02	014. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0015	05.02.02	015. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0016	05.02.02	016. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0017	05.02.02	017. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0018	05.02.02	018. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0019	05.02.02	019. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0020	05.02.02	020. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0021	05.02.02	021. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0022	05.02.02	022. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0023	05.02.02	023. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0024	05.02.02	024. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0025	05.02.02	025. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0026	05.02.02	026. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0027	05.02.02	027. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0028	05.02.02	028. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0029	05.02.02	029. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0030	05.02.02	030. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0031	05.02.02	031. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0032	05.02.02	032. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0033	05.02.02	033. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0034	05.02.02	034. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0035	05.02.02	035. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0036	05.02.02	036. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0037	05.02.02	037. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0038	05.02.02	038. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0039	05.02.02	039. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0040	05.02.02	040. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0041	05.02.02	041. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0042	05.02.02	042. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0043	05.02.02	043. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0044	05.02.02	044. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0045	05.02.02	045. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0046	05.02.02	046. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0047	05.02.02	047. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0048	05.02.02	048. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0049	05.02.02	049. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0050	05.02.02	050. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0051	05.02.02	051. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0052	05.02.02	052. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0053	05.02.02	053. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0054	05.02.02	054. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0055	05.02.02	055. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0056	05.02.02	056. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0057	05.02.02	057. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0058	05.02.02	058. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0059	05.02.02	059. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0060	05.02.02	060. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0061	05.02.02	061. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0062	05.02.02	062. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0063	05.02.02	063. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0064	05.02.02	064. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0065	05.02.02	065. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0066	05.02.02	066. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0067	05.02.02	067. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0068	05.02.02	068. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0069	05.02.02	069. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0070	05.02.02	070. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0071	05.02.02	071. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0072	05.02.02	072. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0073	05.02.02	073. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0074	05.02.02	074. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0075	05.02.02	075. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0076	05.02.02	076. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0077	05.02.02	077. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0078	05.02.02	078. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0079	05.02.02	079. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0080	05.02.02	080. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0081	05.02.02	081. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0082	05.02.02	082. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0083	05.02.02	083. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0084	05.02.02	084. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0085	05.02.02	085. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0086	05.02.02	086. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0087	05.02.02	087. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0088	05.02.02	088. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0089	05.02.02	089. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0090	05.02.02	090. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0091	05.02.02	091. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0092	05.02.02	092. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0093	05.02.02	093. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0094	05.02.02	094. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0095	05.02.02	095. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0096	05.02.02	096. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0097	05.02.02	097. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0098	05.02.02	098. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0099	05.02.02	099. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0100	05.02.02	100. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0101	05.02.02	101. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0102	05.02.02	102. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0103	05.02.02	103. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0104	05.02.02	104. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0105	05.02.02	105. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0106	05.02.02	106. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0107	05.02.02	107. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0108	05.02.02	108. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0109	05.02.02	109. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0110	05.02.02	110. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0111	05.02.02	111. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0112	05.02.02	112. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0113	05.02.02	113. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0114	05.02.02	114. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0115	05.02.02	115. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0116	05.02.02	116. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0117	05.02.02	117. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0118	05.02.02	118. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0119	05.02.02	119. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0120	05.02.02	120. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0121	05.02.02	121. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0122	05.02.02	122. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0123	05.02.02	123. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0124	05.02.02	124. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0125	05.02.02	125. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0126	05.02.02	126. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0127	05.02.02	127. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0128	05.02.02	128. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0129	05.02.02	129. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0130	05.02.02	130. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0131	05.02.02	131. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0132	05.02.02	132. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0133	05.02.02	133. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0134	05.02.02	134. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0135	05.02.02	135. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0136	05.02.02	136. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0137	05.02.02	137. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0138	05.02.02	138. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0139	05.02.02	139. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0140	05.02.02	140. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0141	05.02.02	141. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0142	05.02.02	142. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0143	05.02.02	143. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0144	05.02.02	144. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0145	05.02.02	145. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0146	05.02.02	146. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0147	05.02.02	147. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0148	05.02.02	148. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0149	05.02.02	149. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0150	05.02.02	150. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0151	05.02.02	151. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0152	05.02.02	152. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0153	05.02.02	153. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0154	05.02.02	154. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0155	05.02.02	155. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0156	05.02.02	156. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0157	05.02.02	157. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0158	05.02.02	158. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0159	05.02.02	159. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0160	05.02.02	160. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0161	05.02.02	161. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0162	05.02.02	162. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0163	05.02.02	163. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0164	05.02.02	164. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0165	05.02.02	165. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0166	05.02.02	166. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0167	05.02.02	167. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0168	05.02.02	168. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0169	05.02.02	169. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0170	05.02.02	170. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0171	05.02.02	171. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0172	05.02.02	172. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0173	05.02.02	173. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0174	05.02.02	174. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0175	05.02.02	175. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0176	05.02.02	176. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0177	05.02.02	177. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0178	05.02.02	178. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0179	05.02.02	179. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0180	05.02.02	180. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0181	05.02.02	181. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0182	05.02.02	182. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0183	05.02.02	183. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0184	05.02.02	184. Penerbitan	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.02.01.0185	05.02.02	185. Penerbit







LEMBAR RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
UNIT KERJA

PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi : 10403748 - SD NEGERI 003 BENAI KECIL

Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5	BELANJA	112.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	91.454.500
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	91.454.500
5.1.02.01	BELANJA BARANG	25.438.500
5.1.02.02	BELANJA JASA	66.016.000
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	0
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	0
5.2	BELANJA MODAL	21.045.500
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	3.000.000
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	18.045.500
	JUMLAH BELANJA	112.500.000
	DEFISIT	

Rencana Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja per Tahap

No.	Uraian	Tahap:		
		I	II	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	56.250.000	56.250.000	
2.1	Belanja Operasi	46.815.500	44.639.000	91.454.500
2.2	Belanja Modal	9.434.500	11.611.000	21.045.500
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
4.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0

Kec. Benai, 29 November 2024

Mengetahui,
Kepala Sekolah

JUNAIDI, S.Pd.SD

NIP. 196706211994041001

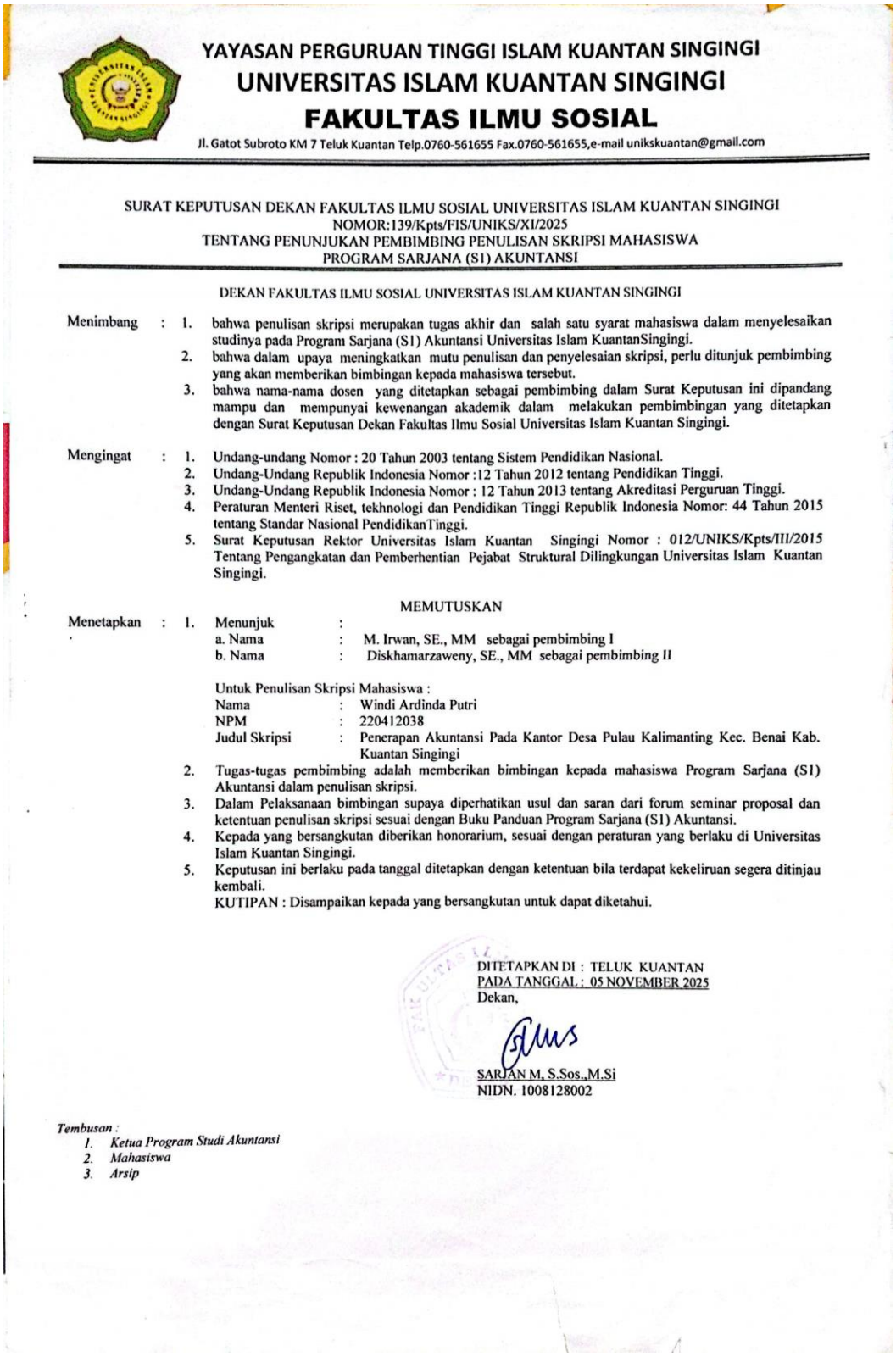
Lampiran 2. Wawancara

Pertanyaan Wawancara

1.	Bagaimana penetapan alokasi dana BOS yang dilakukan oleh sekolah?	Alokasi dana BOS ditetapkan otomatis oleh kementerian sebesar Rp 900.000 per siswa berdasarkan data yang ada di Dapodik, jadi dana yang ditetapkan yaitu 900.000 dikali dengan berapa jumlah siswa pertahun.
2.	Kapan Waktu Penyaluran Dan BOS?	Dana BOS disalurkan secara berkala per semester langsung dari Rekening Kas Negara ke rekening kas daerah baru ke rekening sekolah, dengan 2 tahap
3.	Bagaimana mekanisme penyaluran Dana Bos? Penggunaan Dana BOS	Mekanismenya menggunakan sistem transfer reguler dari Kas Negara ke Kas Daerah lalu langsung diteruskan ke rekening resmi sekolah tanpa ada hambatan perantara.
4.	Bagaimana strategi sekolah dalam menyikapi aturan larangan penggunaan dana BOS yang sangat ketat, terutama ketika sekolah dihadapkan pada situasi mendesak atau kebutuhan darurat di lapangan? Mohon ceritakan kendala nyata yang pernah dihadapi?	Sejauh ini belum ada kendala, tetapi misalkan ada kendala dalam penggunaan dana maka kami akan membatasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan
5.	Bagaimana Penggunaan dana BOS tersebut?	Dana BOS digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia seperti pengadaan ATK dan bahan kebersihan, internet/listrik, perpustakaan membayar gaji honorer
6.	Apa saja ketentuan mekanisme pembelian atau pengadaan barang dan jasa dana BOS?	Ketentuannya wajib mengutamakan skala prioritas kebutuhan fasilitas belajar mengajar dengan mengedepankan prinsip efisiensi biaya, transparansi, serta bebas dari penyimpangan anggaran
7.	Apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak sekolah?	Sekolah harus melengkapi dokumen tahunan RKAS, Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku

		Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, serta laporan realisasi fisik per semester.
8.	Apa konsekuensinya jika sekolah terlambat menyerahkan laporan pertanggung jawaban?	Konsekuensinya yaitu pencairan dana tahap berikutnya akan terhambat, dana yang cair akan dipoting atau tidak keluar sama sekali

Lampiran 3. SK Pembimbing



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:139/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : M. Irwan, SE., MM sebagai pembimbing I
   b. Nama : Diskhamarzaweny, SE., MM sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Windi Ardinda Putri
   NPM : 220412038
   Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Pulau Kalimanting Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M. S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Akuntansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

Lampiran 4. Surat Balasan Prariset

SD NEGERI 003 BENAI KECIL
KABUPATEN KUANTAN SINGING
AKREDITASI : A
NPSN: 10403748
Alamat: Benai Kecil, Benai Kabupaten Kuantan Singingi-Riau 29562
Email : sdn003benaikecil@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri 003 Benei Kecil dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : WINSI ARDINDA PUTRI

NIM : 220412038

PROGRAM STUDI : Akuntansi

FAKULTAS : Ilmu Sosial

UNIVERSITAS : Universitas Islam Kuantan Singingi

Mahasiswa tersebut telah diterima atau telah diberi izin melakukan kegiatan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Ilmiah (Skrupsi) sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian : SD Negeri 003 Benai Kecil

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benai, 27 Agustus 2026
Kepala Sekolah

JUNAIDI, S.PD.SD
Nip; 196706211994041001

Lampiran. 5. Kartu Bimbingan Proposal dan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	WINDI ARDINDA PUTRI
NPM	:	220412038
Pembimbing I	:	M. Irwan, SE., MM
Pembimbing II	:	Diskhamarzaweny, SE., MM
Judul skripsi	:	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	24/6 2026.	Revisi Judul		
2.	2/3 2026.	Judul		
3.	6/4 2026	Lanjut Pembimbing II		
4.	14/4-2026	Revisi bab I-II Serva Sara		
5.	23/4-2026	Revisi bab II-III Serva Sara		
6	24/4-2026	ACC UAK Seminar Proposal		
7	24/9 2026	Acc Lanjut.		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WINDI ARDINDA PUTRI
NPM : 220412038
Pembimbing I : M. Irwan, SE., MM
Pembimbing II : Diskhamarzaweny, SE., MM
Judul skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	5/8 2026	Lanjut Bab IV, V		
2.	10/8 2026	Lanjut Pembahasan 2.		
3.	11/8-2026	Revisi Hasil Penelitian agar sesuai dg bab sebelumnya		
4.	18/8-2026	Revisi bab IV - V Secara Saran		
5.	19/8-2026	Revisi Hasil Penelitian Secara Saran		
6	26/8 2026	Acc		
7.	27/8-2026	Revisi tabel di bab IV dan bab V		
8.	28/8-2026	ACC Utk Ujian Skripsi		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

Lampiran 6. Lembaran Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal

Form 11

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Windi Ardina Putri
NPM : 220412038
Program Studi : Akuntansi.
Judul : **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kab. Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Selasa/ 08 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	M. Irwan, SE.,MM	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota 1	3.
4.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak	Anggota 3	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

Lampiran 7 Lembaran Persetujuan Pembimbing Revisi Skripsi

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Windi Ardinda Putri**

NPM : 220412038

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 08 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sepridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	M. Irwan, SE., MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM / Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax 0760-561655,e-mail uniksKuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 8 Mei 2026

No : 120/FIS/UNIKS/PM1I/V/2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Permohona Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Windi Ardinda Putri
NPM	: 220412038
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: SD Negeri 003 Benai Kecil Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMERINTAH KABUPA TEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 161/DPMPTSP-PSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:120/FIS/UNIKS/PMH/V/2026 Tanggal 8 MEI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada

Nama	:	**WINDI ARDINA PUTRI**
NIM	:	220412038
Jurusan	:	AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**SD NEGERI 003 BENAI KECIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran 8. Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup



I. Identitas Diri

Nama	: WINDI ARDINDA PUTRI
Tempat, Tanggal Lahir	: Pulau Kalimanting, 30 September 2003
Alamat Rumah	: Desa Pulau Kalimanting, Kecematan Benai
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Nomor HP	: +62 822-8357-6169
Alamat E-mail	: windiardinaputri@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

a.	2009-2016	: SD Negeri 013 Pulau Kalimanting
b.	2016-2019	: SMP Negeri 2 Benai
c.	2019-2022	: SMK Negeri 1 Benai
d.	2022-2026	: Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Riwayat Organisasi

Magang Tahun 2025 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singing

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 28 Agustus 2026

WINDI ARDINDA PUTRI
220412038